



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAMSU RIZAL
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 460444

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.820.000.000
1. Bangunan Seluas 33 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/200 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000		
3. Bangunan Seluas 28 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1 m2/43 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	220.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VIOS 1.5 G A/T NEW Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
2. LAINNYA, BROMPTON S6R GREY STANDARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	105.000.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	344.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.049.200.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	525.000.000
Sub Total	Rp.	9.063.200.000



III. HUTANG

Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.053.200.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.